
Mengenang Kebijakan BJ Habibie Dalam Lepasnya Timor Leste dari Indonesia

Indiana Ngenget¹, Indra Jaya²

¹Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta, Indonesia

²Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, Program Studi Ilmu Komunikasi

Email: indiana.inge@gmail.com¹, indra.jaya@esaunggul.ac.id²

Abstrak

Artikel ini menganalisis faktor-faktor yang mendasari kebijakan politik B.J. Habibie dalam lepasnya Timor Leste dari Indonesia tahun 1999. Metode penelitian ini kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian, dari sejarah politik terdapat perbedaan pandangan mengenai perspektif integrasi dan aneksasi dari pemerintah Indonesia dan masyarakat Timor Leste yang menolak Indonesia. Masuknya Indonesia ke wilayah ini berawal dari kegagalan proses dekolonisasi oleh Portugal. Negara-negara Barat khawatir melihat perkembangan partai politik (Fretilin) yang mempunyai paham komunis akan mengancam Kawasan ini, sehingga Indonesia didorong untuk masuk ke daerah ini. Indonesia berkuasa di Timor Leste selama 23 tahun, persoalan politik daerah ini tidak pernah tuntas. Segala upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia baik berupa pembangunan fisik dan sosial budaya, namun tidak mampu mempengaruhi hati rakyat Timor Leste, yang tetap menolak Indonesia. Ketika konstelasi politik internasional telah berubah secara dramatis, dari konteks perang dingin (Komunisme) ke isu-isu yang lebih lunak seperti hak asasi manusia atau demokratisasi. Perubahan konstelasi politik internasional, negara-negara Barat yang sebelumnya mendukung integrasi wilayah Timor Leste ke Indonesia, akhirnya berbalik arah. Bersama pihak anti integrasi di Timor Leste, mereka menjadi kekuatan besar dalam menekan dan menyalahkan kekuasaan pemerintah Indonesia. Pada sisi lain, PBB tetap konsisten tidak mengakui kedaulatan Indonesia di wilayah ini. Ketika B.J. Habibie menggantikan Soeharto, terjadi euforia reformasi dan menghadapi kenyataan persoalan Timor Timur telah menjadi beban bagi Indonesia. B.J. Habibie memiliki pandangan yang berbeda dengan pendahulunya dalam melihat kompleksitas masalah Timor Leste dan akhirnya mengeluarkan kebijakan politik sebagai solusi yang komprehensif. Kesimpulan kebijakan politik pemerintahan B.J. Habibie mengenai dua opsi referendum (jajak pendapat) yang menyebabkan lepasnya Timor Leste dari wilayah Indonesia, memiliki keterkaitan dengan faktor sejarah politik, dimensi lokal, kekuasaan dengan militeristik, permasalahan HAM, serta tekanan politik internasional.

Kata Kunci: *Kebijakan B.J. Habibie, Timor Leste, Hak Asasi Manusia, Jajak Pendapat/Referendum*

1. PENDAHULUAN

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru, meninggalkan banyak permasalahan bagi penerusnya yaitu B.J. Habibie, salah satu permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya Timor Leste (Timor Timur). Selama 23 tahun pemerintah Indonesia berkuasa di daerah ini, masalah proses integrasi tidak kunjung terselesaikan. Hal ini menyebabkan Indonesia selalu menjadi sorotan yang

bersifat negatif dalam kiprahnya di internasional atau masalah Timor Leste dianggap sebagai “kerikil di dalam sepatu” untuk setiap diplomasi Indonesia di forum internasional.

Pada saat itu, terjadi akumulasi dalam setiap diplomasi Indonesia yaitu adanya tekanan serta ancaman dari komunitas internasional, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat, Australia, Portugal, LSM Internasional serta pihak-pihak lainnya. Ancaman dari komunitas Internasional secara tidak langsung sangat mempengaruhi integritas dan harga diri pemerintah Indonesia dan khususnya mempengaruhi kredibilitas pemerintahan B.J Habibie.

Permasalahan Timor Leste mempunyai kaitan dengan rentang sejarah politik yang Panjang. Selama 23 tahun wilayah Timor Leste berintegrasi dengan Indonesia, Portugal dan PBB sebagai Lembaga tinggi dunia belum mengakui kebasahan terjadinya integrasi. Akibatnya dunia internasional cenderung berpandangan sama dengan PBB, yaitu proses integrasi wilayah Timor Leste ke Indonesia tidak sah, sehingga proses dekolonisasi harus tetap dilakukan. Dunia internasional menganggap pemerintah Indonesia telah melakukan aneksasi terhadap Timor Leste secara sepihak.

Melihat sisi sejarah, proses masuknya Timor Leste ke Indonesia merupakan suatu proses yang tidak berdiri sendiri, namun ada beberapa negara luar seperti Amerika Serikat dan Australia yang mendorong terjadinya proses integrasi, dengan alasan adanya ancaman wilayah Asia Tenggara terhadap perkembangan paham komunisme yang direpresentasikan oleh “Fretilin” yang cenderung kekiri-kirian.

Rentang waktu yang lama yaitu 23 tahun wilayah ini berada di bawah kekuasaan Indonesia, namun konflik politik terus mengemuka. Pada sisi lain, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membangun dan mensejahterakan rakyat Timor Leste dari ketertinggalannya dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, tidak mendapatkan hasil yang memadai. Pasca reformasi, masalah Timor Leste semakin mengemuka, masyarakatnya tetap tidak merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Faktor yang paling mengemuka, kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia di wilayah ini tidak menyeluruh dan banyak permasalahan sosial budaya yang diabaikan, sehingga masyarakat Timor Leste tetap berketat dengan ketertinggalan secara ekonomi. Penyebabnya pemerintah Indonesia melaksanakan dualisme pemerintahan yaitu pemerintahan sipil dan militer yang berjalan beriringan. Peran militer yang dominan di hampir keseluruhan kebijakan pemerintah pusat, mengakibatkan situasi di daerah ini dari waktu ke waktu, semakin tidak kondusif.

Ketika konstelasi politik dunia mengalami perubahan yang dratis pasca perang dingin, isu komunisme telah beralih dengan isu yang lebih lunak seperti: demokratisasi, Hak Asasi Manusia

(HAM), serta lingkungan hidup, yang beriringan dengan meningkatnya peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah ini. Kekerasan-kekerasan yang terjadi mempunyai kaitan dengan militer Indonesia. Sorotan dunia internasional terhadap peristiwa kekerasan di Timor Leste, salah satunya adalah peristiwa “Santa Cruz” tahun 1991. Pada saat itu, opini dunia sangat negatif, PBB mengeluarkan resolusinya kembali dalam menanggapi peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di “Santa Cruz”.

Amerika Serikat melakukan tekanan serta mengancam pemerintah Indonesia, dalam hal penyelesaian masalah HAM di “Santa Cruz”, yang dikaitkan dengan ancaman pembatalan perjanjian pembelian senjata dan pesawat tempur untuk kepentingan militer dan program beasiswa bagi pihak militer untuk belajar di Amerika Serikat dihentikan secara sepihak.

Kemudian salah satu yang paling *urgent* bagi pemerintahan B.J. Habibie pada saat itu adalah masalah penundaan pinjaman dari IMF, yang sangat mengganggu kelangsungan pemerintahannya, dikaitkan dengan sidang umum MPR tahun 1999, akan menuntut pertanggung jawaban.

Jika ditelusuri lebih mendalam, adanya kebijakan politik pemerintahan B.J. Habibie dalam masalah Timor Leste, tidak terlepas dari situasi politik dalam negeri pasca jatuhnya Soeharto, yaitu menguatnya euforia reformasi yang besar, menuntut adanya perubahan serta demokratisasi di segala bidang kehidupan. Pasca Orde Baru, perubahan politik yang ada memberikan ruang gerak kepada kelompok-kelompok anti integrasi baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri kembali melakukan penekanan serta mempengaruhi opini internasional.

Keterbukaan politik di dalam negeri memberikan ruang gerak dan keuntungan tersendiri bagi B.J. Habibie untuk memperoleh simpati dan mengangkat citra dalam komunitas internasional dengan mengeluarkan kebijakan jajak pendapat (dua opsi) kepada masyarakat Timor Leste.

Untuk pemahaman masyarakat Indonesia yang telah hidup Bersama selama 23 tahun dengan masyarakat Timor Leste dan telah merasa wilayah tsb merupakan bagian dari Indonesia tanpa mengabaikan bahwa PBB sebagai Lembaga tinggi dunia belum mengakui. Pemahaman masyarakat Indonesia yang telah terpola oleh pemikiran pemerintahan Soeharto, kebijakan B.J. Habibie dalam memberikan dua opsi (jajak pendapat) kepada masyarakat Timor Leste merupakan suatu Tindakan yang berlebihan. Alasannya pemerintah Indonesia telah banyak mengorbankan yang besar untuk Timor Leste, dengan mengesampingkan wilayah-wilayah Indonesia yang lain. Kemudian ada pemikiran bahwa B.J. Habibie telah mengabaikan peran serta pengorbanan dari TNI/POLRI yang terlibat langsung di wilayah tsb. Pada sisi hukum, adanya TAP MPR No.6/1978 yang mensyahkan masuknya Timor Leste ke wilayah Indonesia belum dicabut keberadaannya (Madjiah, 2002).

Penelitian mengenai lepasnya Timor-Leste dari Indonesia telah banyak dilakukan namun memiliki sudut pandang keilmuan yang beragam. Berikut beberapa penelitian yang dapat dibandingkan yaitu:

No	Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1	Muhammad Irfan	Jurnal, Islam & Contemporary Issues Vol.2, no.1 (2022), hal. 24-31	Identifikasi Konflik di Indonesia: Studi Terhadap Kondisi dan Pemicu Tindakan kekerasan di Timor Timur dan Maluku-Ambon	Kekerasan di Timor Timur
2	Aditiya Mahendra, Emmy Yuniarti Rusadi; Muhammad Dzakhiruddin	Al Ma'arif: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, Vol.4, No.1 (2022), hal. 21-28	Kemerdekaan Timor Portugis sebagai <i>The New World Order</i> Portugal	Kemerdekaan Timor Portugis bukan hanya efek dari Revolusi Bunga akan tetapi ada campur tangan Indonesia dan tekad yang kuat dari masyarakat Timor Portugis sendiri
3	Aninda Kurnia Windiasari dan Muhammad Nur Islami	Proceedings The 1st UMYGrace 2020 (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference), hal. 690-694.	Lepasnya Timor Leste dari Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional	Timor Leste berhasil melepaskan diri dari Indonesia melalui jajak pendapat. Karena pada saat itu Presiden Baharuddin Jusuf Habibie mengaggap Timor Leste berhak menentukan nasibnya sendiri.
4	Renaldo Benarrivo, Nala Nourma Nastiti	Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 2, Desember 2020, hal 171-188	Diplomasi dan Penataan Ruang Pertahanan: Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Indonesia Timor Leste	Hubungan antara Indonesia dan Timor Leste ditandai dengan sengketa perbatasan darat setelah Timor Leste, yang menjadi negara berdaulat.

				Diplomasi dilakukan oleh kedua negara, khususnya bagi Indonesia untuk mendukung tata ruang pertahanan yang ideal
5	Imelda Masni Juniaty Sianipar	Jurnal Sociae Polites 2017, Vol.18.No.1, hal. 1-12.	Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste	Penyelesaian perundingan masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan Timor Leste, dilakukan secara damai, tanpa ancaman kekerasan, dan penghormatan pada hukum internasional.

Mengacu data penelitian lain di atas, membahas permasalahan Timor Leste dengan sudut pandang yang beragam, sementara hasil penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu lebih spesifik menekankan aspek politik yang mempengaruhi kebijakan pemerintahan B. J Habibie, sehingga Timor Leste lepas dari Indonesia.

Upaya-upaya untuk melepaskan diri dari pemerintah Indonesia oleh kelompok-kelompok yang anti integrasi di Timor Leste maupun di dunia Internasional telah berlangsung lama, bahkan selama 23 tahun kekuasaan politik pemerintah Indonesia di wilayah ini. Dalam menganalisis lepasnya Timor Leste, akibat adanya kebijakan politik pemerintahan B.J. Habibie mempunyai relevansi dengan teori disintegrasi yang merupakan dampak dari proses integrasi yang dilakukan oleh negara.

Perspektif Coleman dan Rosberg, Liddle, melihat integrasi nasional di Indonesia didapati dua masalah utama yang berpeluang menjadi potensi disintegrasi yaitu pertama, adanya pembelahan secara horizontal yang berakar dari perbedaan suku, ras, agama dan geografi. Kedua, adanya pembelahan yang bersifat vertikal disebabkan oleh latar belakang pandangan antara elite dan masyarakat (Coleman, Rosberg, Liddle dalam Harris, 1999).

Mengacu perspektif di atas potensi disintegrasi politik di Timor leste memiliki sejarah yang Panjang. Gerakan perlawanan rakyat Timor Leste terhadap pemerintah Indonesia berbeda dengan propinsi-propinsi yang lain. Gerakan pemisahan diri biasanya terjadi di daerah-daerah pinggiran

(*periphery*) yang jauh dari pusat pemerintahan (*centre*), memiliki perasaan etnik yang kuat serta berbeda dengan elite yang memerintah. Salah satu variabelnya bisa bersumber dari variabel lain, yaitu struktur politik yang sentralistik dan menafikan aspirasi lokal.

Pada saat B.J. Habibie secara resmi mengumumkan kebijakan jajak pendapat untuk ditawarkan kepada masyarakat Timor Leste, reaksi yang ada dari masyarakat Indonesia cukup beragam. Jika mencermati inti dari opsi tsb yaitu: opsi pertama, menerima otonomi luas dan opsi kedua, menolak otonomi luas dengan akibat dapat melepaskan diri dari Indonesia. Hal tsb cukup memberikan pemahaman bahwa B.J. Habibie telah mempunyai alasan yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan Timor Leste secara tuntas. Karena Timor Leste, Indonesia telah menuai sorotan, hujatan, kecaman bahkan ancaman dari dunia internasional yang secara langsung telah mengusik harga diri dan integritas pemerintah Indonesia.

Pada akhirnya kebijakan jajak pendapat (dua opsi) yang ditawarkan oleh B.J. Habibie dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan, yang berarti Timor Leste lepas dari Indonesia. Adanya kebijakan jajak pendapat tsb merupakan suatu respon dari pemerintahan B.J. Habibie terhadap tekanan dari komunitas internasional yang berkorelasi dengan latar belakang sejarah politik Timor Leste, dimensi lokal (faktor internal) dan internasional (faktor eksternal) yang melingkupinya.

Inti permasalahan adalah karena masalah dekolonisasi yang tidak tuntas terselesaikan, sehingga komunitas internasional lebih berpandangan sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa integrasi yang dilakukan pemerintah Indonesia selama 23 tahun di Timor Leste tidak sah. Pada sisi lain, realita komunitas dalam negeri (masyarakat Indonesia), terjadi pro dan kontra dalam menanggapi kebijakan B.J. Habibie. Rentang waktu 23 tahun hidup berdampingan sebagai satu bangsa dengan masyarakat Timor Leste bukanlah persoalan mudah bagi masyarakat Indonesia untuk menerima kenyataan hasil jajak pendapat pada 4 september 1999 dengan komposisi 78,50% menolak otonomi dan 21,50% menerima otonomi.

Berdasarkan paparan kronologi di atas, artikel ini mengetengahkan permasalahan: Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan politik pemerintahan B.J. Habibie dalam kasus lepasnya Timor Leste dari Indonesia? Tujuannya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan politik pemerintahan B.J. Habibie dalam kasus lepasnya Timor Leste dari Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penghampiran masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis, untuk menggambarkan hubungan yang lengkap antar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan politik pemerintahan B.J. Habibie.

Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan data-data primer seperti buku, makalah, jurnal, surat kabar, undang-undang, surat keputusan atau ketetapan pemerintah dan sebagainya. Penelitian kepustakaan ini menitikberatkan pada proses identifikasi, yaitu bagaimana proses yang terjadi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan politik pemerintahan B.J. Habibie. Proses identifikasi dengan merunut ke belakang artinya identifikasi semua data yang mempunyai kaitan dengan konteks yang diteliti selama kurang lebih 23 tahun (masa integrasi).

Pengolahan data melalui penekanan pada konteks kajian kasus, dalam upaya memahami permasalahan secara utuh dan menyeluruh (*holistic approach*). Rangkaian pengolahan data bertujuan untuk menjelaskan dan memahami gejala, dengan penekanan pada proses dan jalinan peristiwa, bahwa satu peristiwa dijelaskan dengan peristiwa lainnya melalui kronologi peristiwa. Pengolahan data berdasarkan sumber kepustakaan, dengan jalan menentukan topik, mengidentifikasi data, menganalisa data interpretasi data, dan penulisan secara final.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Timor sebagian mencakup Timor Leste, meliputi wilayah seluas 32.200 km². Pulau ini terletak di Kawasan Asia bertemu dengan Oseania yang terlentang luas di wilayah Asia-Pasifik. Lebih tepatnya pulau ini berjarak 600 km dari Australia dan 2100 km dari Jakarta.

3.1. SEJARAH SINGKAT TIMOR LESTE

Pada 14 Desember 1960, PBB kembali mengeluarkan resolusi, mendesak Portugal menghormati negara-negara jajahannya sebagai negara yang merdeka tanpa syarat, karena ada beberapa negara jajahan Portugal tidak mendapat kemerdekaan (Nur, dkk, 2000). Posisi pemerintah Portugal dalam kompromi dengan resolusi PBB, adalah mengeluarkan kebijakan "*decreto*" yaitu perubahan status negeri-negeri jajahan menjadi propinsi-propinsi seberang lautan. Portugal selalu menyatakan bahwa Timor Portugis bukan negeri jajahan, tapi propinsi yang berada di seberang lautan. Status Timor Leste sebagai provinsi yang berada di seberang lautan tidak berubah hingga terjadinya "revolusi bunga" pada April 1974, dengan kebijakan baru mengenai

dekolonisasi. Revolusi bunga atau “revolusi anyelir” melahirkan kebijakan politik dekolonisasi dari pemerintahan baru Portugal.

Pasca “revolusi bunga”, pemerintah Portugal mengizinkan masyarakat Timor Portugis untuk membentuk partai politik sebagai suatu persiapan menuju referendum yang akan dilaksanakan 13 Maret 1975. Proses dekolonisasi ini mempunyai tiga alternatif yang direncanakan oleh pemerintah Portugal yaitu, 1. Menjadi wilayah otonom dibawah federasi atau berasosiasi dengan Portugal, 2. memisahkan diri sebagai negara yang berdaulat merdeka (sebagai bagian atau di luar persemakmuran Portugal), 3. mengintegrasikan diri dengan Indonesia (Muna,dkk, 1999).

Rakyat Timor Portugis telah lama menunggu kemerdekaan, “revolusi bunga” yang terjadi di Portugal merupakan harapan yang baik. Untuk mempersiapkan adanya peralihan kekuasaan kelompok nasional Timor Portugis mulai membentuk partai politik. Pertama lahir dua partai politik yaitu *Uniao Democratica Timorleste* (UDT) dan *Associacao Sosial Democratica deTimor* (ASDT). Partai ASDT populer dengan nama Fretilin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*) atau Front Revolusioner untuk kemerdekaan Timor Portugis, yang digagas oleh para mahasiswa yang baru Kembali dari Portugal (Nur, dkk, 2000).

Kemudian partai politik lainnya adalah *Associacao Par a Integracao de Timor na Indonesia* (AITI), yang kemudian berubah menjadi *Associacao Popular Democratica Timorence* (Apodeti) sebagai partai yang bertujuan memperjuangkan integrasi dengan Indonesia. Partai Apodeti muncul setelah UDT dan Fretilin menghendaki kemerdekaan melalui referendum yang diawasi oleh negara tetangga dan PBB. Selain ke tiga partai di atas, ada partai *Trabalhista* (partai buruh) dan *KOTA* (*Klibur Oan Timor Asuain*) yang jadi pendukung partai Apodeti dan partai *ADITLA* (*Associacao Democratica dan Integracao de Timor Leste a Australia*) namun membubarkan diri setelah tidak mendapat dukungan Australia (De Sousa Saldanha, 1996).

Situasi di Timor Portugis pada agustus 1975 partai UDT melakukan kudeta dan berhasil menguasai sebagian kota Dili, sehingga mengakibatkan perang saudara antar rakyat Timor Portugis, yang berlangsung antara Fretilin dengan UDT, Apodeti, KOTA dan *Trabalhista*. Pada November 1975, Fretilin menyatakan kemerdekaan Timor Portugis secara sepihak, sehingga sisa-sisa Apodeti UDT, KOTA dan *Trabalhista* menandingi dengan mengadakan deklarasi “Balibo” dan meminta Indonesia untuk masuk ke wilayah Timor Portugis dalam upaya penertiban. Esensi dari deklarasi “Balibo” merupakan pernyataan keinginan mayoritas Timor Portugis untuk integrasi dengan Indonesia.

Kekuatan Fretilin dengan ideologi kiri, didukung oleh pemerintah Portugal secara politik dan persenjataan, yang memicu pemerintah Indonesia mengubah strategi. Situasi politik di Timor

Portugis pada saat itu yang mengubah sikap pemerintah Indonesia dari mendukung dekolonisasi secara damai menjadi terlibat langsung dengan mengirim pasukan dan sukarelawan dalam membantu perjuangan ke empat partai politik yang ada untuk melawan Fretilin,

3.2. INTEGRASI SEBAGAI PILIHAN INDONESIA

Pada 7 Desember 1975, Kota Dili Jatuh ke tangan Indonesia. Pemerintah Indonesia bersikap mendua dalam menyikapi keadaan di Timor Portugis, dengan alasan situasi kawasan yang terancam, dimana perkembangan yang terjadi di wilayah ini akan berimbas pada keamanan teritorial Indonesia yang berbatasan secara langsung. Pemerintah Indonesia secara rahasia mengawali keterlibatannya dalam suatu operasi rahasia yang dikenal istilah “Komodo” yang digagas oleh Ali Moertopo (Singh, 2002).

Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap situasi Timor Portugis dengan melakukan intervensi ada kaitannya dengan faktor kepentingan internasional dalam konteks perang dingin. Deklarasi yang dilakukan oleh Fretilin menjadikan alasan pihak internasional (Amerika Serikat dan Australia) untuk mendukung Indonesia melakukan intervensi karena adanya kekhawatiran meluasnya pengaruh komunis di Asia Tenggara yang direpresentasikan oleh Fretilin. Ada 3 faktor yang mendorong pemerintah bertindak pada September 1975, kegagalan pemerintah Portugal melakukan dekolonisasi, wakil pemerintah Portugal meninggalkan Timor Portugis tanpa tanggung jawab, kekuatan Fretilin yang mengancam kawasan (Singh, 2002).

Secara empiris pada 28 November, Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan dan mengumumkan kemerdekaan republik demokasi Timor-Timur, kemudian ditanggapi oleh para pemimpin pro Indonesia (Apodeti, UDT, KOTA, Trabalhista) melalui deklarasi “Balibo” yang berisikan dukungan integrasi ke Indonesia.

Pernyataan kemerdekaan secara sepihak dari Fretilin, akhirnya memicu pemerintah Indonesia melakukan aksi militer dengan sandi “seroja”, yang didukung oleh kekuatan darat, laut dan udara, tentara Indonesia melakukan serangan ke kota Dili dan sekitarnya. Benny Moerdani, tokoh yang mengawasi operasi seroja menjelaskan:

“Ketika Fretilin mengumumkan kemerdekaannya pada 28 November 1975, pada saat itu para pemimpin Indonesia telah sampai pada batas, dan sesuatu harus dilakukan. Dan sesuatu itu harus dilakukan sebelum republik yang baru saja diumumkan kemerdekaannya itu diakui oleh negara lain. Kalau tidak Indonesia akan dituduh menyerbu sebuah negara merdeka yang telah diakui oleh dunia luar (Singh, 2002).”

Presiden Amerika Serikat Gerald Ford dan Menlu Henry Kissinger pada 5 Desember 1975, mengadakan kunjungan ke Indonesia. Pada saat itu tidak dibicarakan secara terbuka kepada publik tentang maksud dan tujuan kunjungannya tetapi dapat dipahami setelah 24 jam meninggalkan Jakarta, Angkatan bersenjata Indonesia melakukan invansi terhadap Timor Portugis. Mendaratnya Tentara Indonesia di Dili mengakhiri kekuasaan Portugal atas Timor Portugis.

3.3. TIMOR LESTE DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA

Penyatuan integrasi wilayah Timor Leste menjadi propinsi ke dua puluh tujuh Indonesia lewat deklarasi “Balibo”, kemudian dikukuhkan dengan UU No,7 tahun 1976 dan ketetapan MPR No.6 tahun 1978, dalam perjalanannya tetap meninggalkan permasalahan yang belum terselesaikan, baik secara internal maupun eksternal yaitu pihak internasional.

Secara umum UU dan ketetapan MPR di atas, merupakan babakan sejarah Timor Leste sebagai bagian dari Indonesia. Integrasi ini awal masalah dari reaksi yang tidak pernah putus selama 23 tahun kekuasaan Indonesia. Pemerintah Indonesia selalu konsisten menganggap permasalahan integrasi telah final, namun untuk Portugal, PBB dan pihak-pihak yang anti integrasi menganggap integrasi yang dilakukan Indonesia tidak sah.

Pihak-pihak yang anti integrasi beralasan tidak bisa menerima sebuah petisi yang dihasilkan tanpa referendum, apalagi integrasinya dilakukan dengan pengerahan angkatan bersenjata. Posisi ini terus dipropagandakan oleh Portugal, Fretilin dan pada pendukungnya di komunitas internasional.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam kekuasaannya di wilayah ini menerapkan pemerintah sipil-militer, ada 4 Gubernur yang bertugas yaitu Araujo, Goncalves, Carrascalao dan Soares. Peranan dominan dari militer di wilayah ini karena faktor sejarah politik yaitu keberadaan Fretilin, ketika wilayah ini masuk menjadi bagian Indonesia ABRI adalah satu-satunya institusi negara yang berhadapan langsung dengan kelompok anti integrasi.

Salah satu bentuk dari dampak penerapan kebijakan militeristik di wilayah ini adalah terjadinya peristiwa “Santa Cruz” pada November 1991, merupakan konflik politik yang berujung pada kekerasan dan menjadi titik balik dari posisi Indonesia di Timor Leste. Insiden Dili tampil sebagai demonstrasi politik yang besar, dimana integritas kekuasaan Indonesia digugat dan dipertanyakan.

3.4. KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN B.J. HABIBIE

Ketika B.J. Habibie naik menggantikan Soeharto, telah mempunyai perspektif sendiri yang berbeda dalam masalah Timor Leste. Pemerintah Soeharto kerap mengatakan dan bersikukuh bahwa masalah Timor Leste telah selesai dan final. B.J. Habibie mempunyai pandangan berbeda yaitu mengusulkan penyelesaian masalah Timor Leste secara adil, menyeluruh dan dapat diterima oleh masyarakat internasional. Sejak awal pemerintahannya B.J.Habibie kerap mengatakan bahwa semua permasalahan Timor Leste akan diselesaikan sebelum tahun 2000, sehingga pemerintah Indonesia bisa lebih memusatkan perhatiannya kepada 26 propinsi lainnya.

Pandangan B.J. Habibie mengenai Timor Leste, dikutip Kembali oleh Dewi Fortuna Anwar:

“Mengapa kita harus menghadapi demikian banyak masalah Internasional ketika kita dihadapkan pada banyak masalah di rumah kita sendiri? Mengapa kita harus mengalami semua penderitaan ini? Mengapa kita membutuhkan Timor Leste, dan mengapa kita tidak melepaskan mereka saja?”(Lela E, 2002).

Pada saat itu pemerintahan Indonesia mempunyai faktor-faktor pertimbangan politik, ekonomi dan sosial yang tidak dapat ditanggung lagi dengan meningkatnya krisis nasional yang berkepanjangan, sehingga Timor Leste selama itu merupakan satu diantara sumber kelemahan nasional.

Menelusuri perspektif B.J. Habibie dalam permasalahan Timor Leste, selain pandangannya yang berbeda dengan Soeharto, beliau juga kerap mengucapkan makna dari alinea pertama dan keempat yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD 45) yang berisikan tentang kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan Indonesia harus berperan aktif dalam mengupayakan ketertiban dunia dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi (Bhakti, 199).

Faktor-faktor yang melatar belakangi pandangan politik B.J. Habibie dalam masalah Timor Leste yaitu : pertama, PBB sebagai Lembaga tinggi dunia menganggap 23 tahun kekuasaan Indonesia di wilayah ini tidak sah, dimana proses dekolonisasi harus tetap dilakukan, sehingga menjadi wilayah yang merdeka dan berdaulat penuh (Makarim, 2003). Kedua, faktor kesejarahan yang berbeda dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Wilayah Indonesia merupakan peninggalan dari Hindia Belanda, Timor Leste adalah peninggalan Portugis. Ketiga, Timor Leste telah mengurus anggaran yang besar untuk mengelola daerah ini, sementara wilayah ini tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia kerap membandingkan pengorbanan yang telah dilakukannya dengan sikap rakyat Timor Leste yang tetap tidak merasa sebagai bagian dari Indonesia.

Keempat, selama berkuasa di daerah ini pemerintah Indonesia kerap dihadapkan dengan eskalasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Militer Indonesia, hal ini menjadi kelemahan utama dari posisi pemerintah Indonesia. Peningkatan masalah pelanggaran HAM di wilayah ini sangat bertentangan dengan kondisi politik Internasional setelah perang dingin. Pada saat itu perhatian Internasional telah beralih dengan isu-isu yang menempatkan penghargaan terhadap eksistensi utama manusia yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi dan lingkungan hidup.

Keadaan di Timor Leste yang cenderung menafikan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) karena konflik politik terus berlangsung selama 23 tahun Indonesia berkuasa, menyebabkan dunia Internasional melakukan tekanan dan ancaman terhadap pemerintah Indonesia, menuntut pemerintah Indonesia melakukan penyelesaian masalah Timor Leste secara menyeluruh melalui perundingan.

Kelima, dalam pandangan B.J. Habibie masalah Timor Leste menjadi reputasi pemerintahannya, terutama untuk dunia Internasional, yang mengharuskan mengambil kebijakan penyelesaian wilayah ini yang bisa memuaskan semua pihak. Selama 23 tahun pemerintah Indonesia mempunyai perhatian yang penuh terhadap propinsi ke 27 ini, sehingga kerap menimbulkan kecemburuan dari propinsi yang lain. Pengorbanan pemerintah Indonesia dalam memajukan wilayah ini, namun sebagian besar rakyatnya tetap menolak integrasi.

Awalnya B.J. Habibie dalam mencari penyelesaian yang adil dalam masalah Timor Leste mengeluarkan kebijakan otonomi luas dengan status khusus (DOK) pada Juni 1998, yang kemudian dikenal dengan istilah opsi 1, dimana pemerintah Indonesia tetap mempertahankan integrasi Timor Leste ke dalam Indonesia. Kebijakan otomi khusus ini wilayah Timor Leste akan memperoleh Self governing dengan kewenangan luas di berbagai bidang, politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Pemerintah pusat memegang tiga kewenangan tertentu seperti politik luar negeri, keamanan internal/eksternal, moneter dan fiskal.

Di lain pihak, Portugal dan tokoh-tokoh penentang integrasi mempunyai pandangan berbeda yaitu tetap menghendaki proses penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Leste melalui referendum, otonomi luas hanya merupakan proses menuju referendum. Posisi Indonesia sangat dilematis, bahkan Menlu Ali Alatas mengatakan selama perundingan Tripartit tahun 1998 di PBB, Indonesia selalu dihujat, dicemooh, dikecam, seraya mengatakann penyelesaian dengan otonomi tidak mungkin dilaksanakan.

Pada akhirnya B. J. Habibie mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan yang melengkapi kebijakan pertamanya yaitu opsi 1, Beliau melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh

Menlu Ali Alatas dan para diplomatnya, dubes keliling khusus untuk Timor Leste, Lopez da Cruz mengalami kebuntuan dan tidak mengalami kemajuan.

Salah satu analisis yang kerap dikemukakan faktor utama lahirnya kebijakan opsi kedua dari B.J. Habibie adalah penolakan dari Portugal dan tokoh-tokoh Timor Leste dan adanya surat PM Australia John Howard yang mendukung otonomi luas namun dengan penekanan pada penentuan nasib sendiri melalui referendum. Kemudian Amerika Serikat melalui Presiden Clinton dengan tegas mengatakan akan memblokir pencairan dana IMF untuk Indonesia dan tidak akan memberikan bantuan ekonomi lebih jauh kepada Indonesia, jika terus menahan keinginan rakyat Timor Leste untuk merdeka.

Kebijakan opsi kedua akhirnya dikeluarkan pada sidang kabinet 27 Januari 1999, kebijakan ini diputuskan melalui Tarik ulur diantara menteri pembantu Presiden B.J. Habibie. Pertimbangan utamanya adalah beberapa faktor dan pendapat serta perspektif Internasional mengenai Timor Leste.

Kebijakan opsi ke kedua yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu, opsi pertama menerima otonomi luas, opsi kedua menolak otonomi dengan akibat melepaskan diri dengan Indonesia. Akhirnya jajak pendapat dilaksanakan 30 Agustus 1999 secara serentak di bawah pengawasan wakil PBB yaitu UNAMET

Pengumuman hasil jajak pendapat dimajukan lebih awal dari rencana semula yaitu pada 4 September 1999, dengan komposisi 344.580 (78,50%) menolak otonomi dan 94.388 (21,50%) menerima otonomi. Hasil jajak pendapat ini sebelumnya diberitahukan kepada B.J. Habibie oleh Sekjen PBB Kofi Annan dan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, dan B.J. Habibie menyatakan menerima apapun hasilnya tanpa argumentasi. Akhirnya pada tataran ini makan kebijakan Politik pemerintahan B.J. Habibie telah mengakibatkan lepasnya Timor Leste dari Indonesia.

4. KESIMPULAN

Melihat perjalanan sejarah Timor Leste maka karakteristik permasalahan adalah adanya proses dekolonisasi yang tidak tuntas. Selama 23 tahun kekuasaan pemerintah Indonesia di daerah ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga tinggi dunia tetap konsisten tidak mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Searus dengan pandangan PBB, maka komunitas Internasional umumnya mempunyai pandangan yang sama dengan konsistensi PBB. Inti permasalahan di atas pada akhirnya berkorelasi dengan lemahnya posisi pemerintah Indonesia dihadapan komunitas Internasional, terutama di hadapan Lembaga tinggi dunia PBB.

Pada akhirnya permasalahan Timor Leste selama 23 tahun bertitik tolak pada belum adanya pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal inilah yang mengakibatkan adanya pandangan yang berbeda dalam melihat integrasi versi Indonesia, dari kelompok-kelompok yang berseberangan secara politik. Pemerintah Indonesia selalu bersikukuh bahwa integrasi telah final, sementara kelompok yang mengacu pada sikap PBB tidak menerima klaim integrasi dari Indonesia., yang berarti kekuasaan Indonesia di Timor Leste tidak sah.

Kebijakan jajak pendapat dua opsi pada hakekatnya merepresentasikan nilai-nilai politik yaitu kepentingan pemerintah Indonesia, masyarakat Timor Leste serta komunitas Internasional, juga nilai-nilai ideologi dan aspek psikologis yang diyakini oleh B.J. Habibie. Dalam hal ini B.J. Habibie mempunyai perspektif yang berbeda dengan pendahulunya Soeharto.

REFERENSI

- Benarrivo, Renaldo, Nastiti, Nala Nourma. (2020). Diplomasi dan Penataan Ruang Pertahanan: Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Indonesia Timor Leste, *Jurnal Dinamika Global*, Vol. 5 No. 2, hal 171-188
- Irfan, Muhammad. (2022). Identifikasi Konflik di Indonesia: Studi Terhadap Kondisi dan Pemicu Tindakan kekerasan di Timor Timur dan Maluku-Ambon, *Jurnal Islam & Contemporary Issues*, Vol.2, no.1, hal. 24-31
- Madjiah, Lela E. (2002). *Timor-Timur Perginya si Anak Hilang*. Jakarta: Antara Pustaka Utama
- Mahendra, Aditiya, Rusadi, Emmy Yuniarti, Dzakiruddin, Muhammad. (2022). Kemerdekaan Timor Portugis sebagai The New Word Order Portugal, *Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol.4, No.1, hal. 21-28.
- Makarim, Zacky Anwar, dkk. (2003). *Hari-Hari Terakhir Timor Timur Sebuah Kesaksian*. Jakarta: PT. Sportif Media Informasindo.
- Muna, M Riefqi, dkk. (1999). *Agenda Kebijakan Luar Negeri RI Memasuki Abad 21: Fokus Timor-Timur*. Jakarta: PPW-LIPI.
- Nur, Rivai, dkk. (2000). *Saatnya Militer Keluar Dari Politik*. Jakarta: Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK).
- Nusa Bhakti, Ikrar. (1999). *Dua Opsi Baru Penyelesaian Masalah Timor Timur. Akan Terbitkah Fajar Kemerdekaan di Bumi Lorosae?* Dalam Agenda Kebijakan Luar Negeri RI Memasuki Abad 21: Fokus Timor Timur. Jakarta Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI.
- Sianipar, Imelda Masni Juniaty. (2017). Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste, *Jurnal Sociae Polites*, Vol.18, No.1, hal. 1-12.
- Singh, Bilveer. (2002). *Habibie dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: CIDESINDO.

Windiasari, Aninda Kurnia, Islami, Muhammad Nur. (2020). Lepasnya Timor Leste dari Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional, *Proceedings The 1st UMYGrace 2020* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference), hal. 690-694.

